

**KAJIAN LINGKUNGAN
KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL**



TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan**

**oleh :
Bambang Budiman
L4K009003**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

TESIS

**KAJIAN LINGKUNGAN
KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL**

Disusun oleh :
Bambang Budiman
L4K009003

Mengetahui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Sudharto. P Hadi, MES

Dra. Sri Suryoko, Msi

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN
KAJIAN LINGKUNGAN
KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL

disusun oleh :

Bambang Budiman
L4K009003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 4 September 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Dr. Sudharto. P Hadi, MES

.....

Anggota :

1. Dra. Sri Suryoko, Msi

.....

2. Dr. Hardi Warsono, M.TP

.....

3. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, 4 September 2010

BAMBANG BUDIMAN
NIM. L4K 009 003

ABSTRAK

Kawasan Banjaran merupakan kawasan perdagangan yang terbesar di Kabupaten Tegal. Letaknya yang strategis yaitu di jalur utama Tegal – Purwokerto menjadikan kawasan ini penuh dengan aktivitas warga. Ada dua pasar yang berada di kawasan ini yaitu Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna yang terhubung oleh trotoar. Kondisi trotoar dan bahu jalan saat ini menjadi tempat aktivitas Pedagang Kaki Lima yang menjadikan kawasan kumuh, semrawut, menimbulkan kemacetan dan sampah.

Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan suatu kajian lingkungan keberadaan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menata dan mengelola kawasan secara menyeluruh.

Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian meliputi dampak keberadaan PKL terhadap lingkungan, persepsi masyarakat dan PKL terhadap keberadaan dan dampaknya pada lingkungan serta analisis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang pengelolaan kawasan dan pedagang kaki lima di kawasan Banjaran. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar dan pedagang kaki lima dengan menggunakan purposive sampling.

Berdasarkan penelitian, keberadaan PKL di kawasan Banjaran selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak positif yaitu membuka lapangan kerja dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah melalui retribusi sebesar 3,16 persen dari total retribusi daerah. Dampak negatif PKL yaitu menempati ruang publik yang bukan peruntukannya, seperti di trotoar dan bahu jalan. Hal ini dipengaruhi faktor dari luar seperti adanya perbaikan pasar dan dari dalam diri PKL untuk meraih konsumen sehingga pendapatan bertambah. Dampak negatif lain yaitu menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah yang dihasilkan (mencapai 4,25 m³ per hari), kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara. Untuk konsentrasi total partikel debu (TSP) di pasar Banjaran mencapai 235,8 µ/Nm³ dan 325,8 µ/Nm³ untuk desa Adiwerna dari baku mutu yang ditetapkan sebesar 230 µ/Nm³. Sedangkan hasil pengukuran tingkat kebisingan di pasar Banjaran mencapai 73,2 dBA dari baku mutu yang ditetapkan sebesar 55 dBA. Berdasarkan hasil pengukuran mutu air sungai Kali Jembangan yang berada di kawasan, status mutu airnya adalah tercemar sedang dengan parameter air yang melebihi baku mutu yaitu DO, BOD, phenol. Jika dilihat secara sepintas memang PKL yang diuntungkan dengan beraktivitas di trotoar dan bahu jalan karena pendapatannya meningkat, dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan karena menurunnya kualitas lingkungan. Tapi jika dicermati lebih jauh semua stakeholder kawasan dirugikan.

Usulan pengelolaan Kawasan Banjaran yang dapat dilakukan adalah : menata kawasan yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan pelaku utama kawasan yaitu PKL, masyarakat dan pemerintah; penyediaan prasarana sampah yang memadai dan pengelolaan sampah yang baik; membuat peraturan daerah yang khusus mengatur PKL dengan mengintegrasikan agenda lingkungan kedalamnya; meningkatkan koordinasi antar institusi yang menangani PKL dan terlibat dalam pengelolaan kawasan; relokasi PKL ke dalam pasar karena kapasitas pasar masih mampu menampung jumlah pedagang yang ada.

Kata kunci : PKL , dampak lingkungan, usulan pengelolaan.

ABSTRACT

Banjaran region is the largest trade center in Tegal Regency. Because of its strategic site, which is situated on the main street connecting Tegal-Purwokerto, this area becomes the activity center of the city resident. There are two traditional markets in this area, Pasar Banjaran and Pasar Adiwerna, which are connected by sidewalk. Current condition of the sidewalk and road shoulder into the activities of street vendors who made the slum, crowded, causing traffic jams and waste.

Based on the facts above, it is necessary to conduct a study on environmental impact of the existence of the street vendors. This study will be a positive input for the government of Tegal Regency to organize and managing the region as the whole.

Type of research is a descriptive study with qualitative approach. Scope of research covers the impact of the existence of street vendors on the environment, public perception on the existence of street vendors and its impacts on the environment, policy analysis of the Tegal regency government on the management area and the street vendors in the Banjaran region. Samples used in this research are people and street vendors by using purposive sampling

Based on research, the existence of street vendors creates positive and negative impacts on environment. The positive impact includes open job and giving contribution on local income through regional themselves income of 3.16 percent of total. The negative impact of street vendors which occupy public space rather than its allocation for, like sidewalk and shoulder of the road. This is influenced by external factors such as improvement of market and from street vendors to reach consumers. Another negative impact are declining environmental quality due to waste generated (up to 4.25 m³ a day), traffic congestion and air pollution. For the total concentration of dust particles (TSP) in the Pasar Banjaran reached 235.8 µ/Nm³ and 325.8 µ/Nm³ to the village Adiwerna from the quality standard was set at 230 µ/Nm³. While the measurement noise level in the pasar Banjaran reached 73.2 dBA of quality standard was set at 55 dBA. Based on measurement of water quality of kali Jembangan residing in the region, the status of water quality are medium polluted with water parameters that exceeds the standard of DO, BOD, and phenols. It seems that the street vendors is the only side which gains the benefits because their income increases and the publik gains the negative effect because of the declining environmental quality, but actually all the stakeholders in this area get the negative effects.

The proposed management included are managing environmental areas by involving the main actors areas like street vendors, public and government; provision of adequate waste infrastructure and waste management better; create a special local regulations which regulate street vendors by integrating the environmental agenda into it and increase coordination among institutions to handle with street vendors and are involved in the management area; relocate street vendors into the market because the market capacity is still able to accommodate all the existing traders.

Keywords : street vendors, environmental impact, proposed management

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah hirobbil alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan tesis dengan judul "Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal". Studi ini dilakukan untuk mengkaji dampak lingkungan akibat aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Banjaran.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES, selaku pembimbing utama sekaligus Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan disela-sela kesibukannya.
3. Dra. Sri Suryoko, Msi, selaku Pembimbing dan Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan disela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.
4. Dr. Hardi Warsono, M.TP, selaku Penguji yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini.
5. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA, selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. Pusbindiklatren BAPPENAS yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi ini.
7. Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.

8. Pengelola dan pengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membuka wawasan penulis selama menempuh studi.
9. Staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu.
10. Keluarga atas dukungan semangat dan do'anya.
11. Teman – teman di Pemerintah Kab. Tegal, I'o, Sigit, Puji, Ricci, mas Indra, Arif, Dessi, Ngadimo, mba Mien atas dukungan semangat dan bantuannya.
12. Sahabat Bappenas-MIL UNDIP Angkatan 24, atas kebersamaan dan kekompakan selama studi di MIL - UNDIP, merupakan kenangan yang tak terlupakan.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis menantikan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menjadikan karya ilmiah ini lebih baik .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 September 2010

Penulis

Bambang Budiman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
	halaman
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Pengertian Sektor Informal	16
2.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	18
2.2.1 Sarana Fisik	18
2.2.2 Pola Pelayanan Kegiatan	22
2.3 Ruang Terbuka.....	23
2.3.1 Pengertian Ruang Terbuka	23
2.3.2 Pemanfaatan Ruang Terbuka.....	24
2.4 Perencanaan Kota.....	25
2.4.2 Teori Perencanaan	26
2.5 Kualitas Lingkungan.....	27
2.5.1 Pemahaman Lingkungan.....	28
BAB.III METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.2.1 Lingkup Penelitian	30
3.2.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Populasi dan sampel	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35

3.6 Pengolahan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal	38
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Adiwerna	40
4.2 Gambaran Umum kawasan Banjaran	44
4.2.1 Pasar Banjaran	46
4.2.2 Pasar Adiwerna	47
4.2.3 Pendukung Kawasan	48
4.3 Aktivitas PKL di Kawasan Banjaran	50
4.3.1 Aktivitas PKL di Trotoar Jalan Raya Selatan	52
4.3.2 Aktivitas PKL di Trotoar Jalan Raya Barat	52
4.4 Karakteristik PKL di kawasan Banjaran	55
4.4.1 Tingkat Pendidikan	55
4.4.2 Sifat Usaha Pedagang Kaki Lima	55
4.4.3 Jenis Dagangan PKL	56
4.4.4 Alat Dagang PKL	57
4.4.5 Luas Ruang Usaha PKL	58
4.5 Analisis Dampak Keberadaan PKL terhadap Lingkungan	59
4.5.1 Dampak Positif	60
4.5.2 Dampak Negatif	63
4.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Keberadaan PKL	79
4.7 Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap PKL	80
4.7.1 Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pedagang Kaki Lima	80
4.7.2 Kebijakan Pengelolaan Kawasan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal	83
4.7.3 Persepsi PKL terhadap kebijakan Pemda	90
4.8 Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Banjaran	93
4.8.1 Identifikasi Masalah	94
4.8.2 Formulasi Tujuan.....	95
4.8.3 Analisis Kondisi	95
4.8.4 Alternatif Kebijakan.....	98
4.8.5 Pilihan Kebijakan	100
4.8.6 Kajian Dampak	101
4.8.7 Pengambilan Keputusan	101
BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Rekomendasi	108

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 : Salah satu sudut di kawasan Banjaran kumuh dan tidak tertata	7
Gambar 1.2 : Sampah yang dibuang sembarangan disekitar lokasi PKL di kawasan Banjaran	8
Gambar 1.3 : Trotoar yang berubah fungsi menjadi lapak PKL di salah satu sudut kawasan Banjaran	9
Gambar 1.4 : Kerangka pikir penelitian	11
Gambar 2.1 : PKL berjualan di trotoar dan bahu jalan	19
Gambar 3.1 : Peta Kabupaten Tegal	32
Gambar 4.1 : Lokasi 3 pasar di Kecamatan Adiwerna	43
Gambar 4.2 : Kota Adiwerna	45
Gambar 4.3 : Aktivitas di depan Pasar Banjaran	47
Gambar 4.4 : Aktivitas di depan Pasar Adiwerna	48
Gambar 4.5 : Pengelompokan jenis dagangan	51
Gambar 4.6 : Sketsa Kawasan Banjaran	54
Gambar 4.7 : Alat dagang PKL berupa gelaran	58
Gambar 4.8 : Alat dagang PKL yang Luas dan menutup trotoar	59
Gambar 4.9 : Penyebab PKL bertempat di trotoar dan Bahu jalan	67
Gambar 4.10 : TPS yang letaknya disekitar pemukiman dan terbuka ...	70
Gambar 4.11 : Sampah yang dibuang sembarangan di bahu jalan. Oleh PKL di Banjaran	72
Gambar 4.12 : Sampah yang dibuang sembarangan disekitar lokasi PKL di Banjaran	72
Gambar 4.13 : Kemacetan lalu lintas di kawasan Banjaran	76
Gambar 4.14 : Operasi penertiban PKL di kawasan Banjaran oleh Satpol PP	86
Gambar 4.15 : Papan pengumuman larangan berjualan di trotoar yang sudah kadaluarsa	91

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel I.1	: Laju pertumbuhan penduduk Kab. Tegal 2003 – 2008 ..	3
Tabel I.2	: Data Ketenagakerjaan Kab. Tegal 2003-2008	4
Tabel IV.1	: Pembagian Wilayah Administratif di Kab. Tegal	40
Tabel IV.2	: Luas Wilayah Desa dan Kepadatan Penduduk Tahun 2008 di Kecamatan Adiwerna	42
Tabel IV.3	: Jumlah Pedagang Pasar Banjaran	46
Tabel IV.4	: Kapasitas Pasar Banjaran	46
Tabel IV.5	: Jumlah Pedagang Pasar Adiwerna	47
Tabel IV.6	: Kapasitas Pasar Adiwerna	48
Tabel IV.7	: Tingkat pendidikan PKL	55
Tabel IV.8	: Sifat Usaha Pedagang Kaki Lima	56
Tabel IV.9	: Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima	56
Tabel IV.10	: Alat Dagang Pedagang kaki Lima	57
Tabel IV.11	: Luas Ruang usaha Pedagang Kaki Lima	58
Tabel IV.12	: Jumlah PKL di kawasan Banjaran 2006-2009	60
Tabel IV.13	: Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kab. Tegal Tahun 2008.	61
Tabel IV.14	: Retribusi Pasar	62
Tabel IV.15	: Tempat PKL sebelum di trotoar /bahu jalan	65
Tabel IV.16	: Alasan keluar PKL dari pasar	66
Tabel IV.17	: Pendapatan PKL di trotoar/Bahu jalan	67
Tabel IV.18	: Produksi sampah rata-rata per hari di kawasan Banjaran bulan Juni 2010	69
Tabel IV.19	: Produksi sampah rata-rat perhari Kab. Tegal	69
Tabel IV.20	: Pembentukan Sampah padat kota dan sampah padat Industri di Kabupaten Tegal tahun 2004-2008	70
Tabel IV.21	: Pembentukan sampah padat di kawasan Banjaran Keadaan bulan Juni 2010	71
Tabel IV.22	: Banyaknya sampah menurut jenis sampah di kawasan Banjaran keadaan bulan Juni 2010	71
Tabel IV.23	: Hasil Penentuan Status Mutu Air Kali Jembangan Tahun 2009.....	73
Tabel IV.24	: Jumlah Kendaraan yang terjebak kemacetan	76
Tabel IV.25	: Hasil Pemeriksaan kualitas Udara Ambient/udara luar Di desa Adiwerna dan Banjaran.....	77
Tabel IV.26	: Persepsi Masyarakat terhadap keberadaan PKL di kawasan	79
Tabel IV.27	: Persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan keberadaan PKL	80
Tabel IV.28	: Usulan Penataan Kawasan oleh masyarakat	80
Tabel IV.29	: Rangkuman Peraturan Daerah	82
Tabel IV.30	: Persepsi PKL terhadap Peraturan daerah	91

Tabel IV.31	:	Persepsi PKL terhadap retribusi	92
Tabel IV.32	:	Persetujuan PKL terhadap penataan kawasan	93
Tabel IV.33	:	Usulan penataan oleh PKL	93
Tabel IV.34	:	Matrik rencana pengelolaan kawasan Banjaran	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia. Keadaan ini diperburuk dengan adanya krisis ekonomi berkepanjangan yang telah menyebabkan terpuruknya perekonomian di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia yang ikut merasakan imbasnya. Sebagai dampak hal tersebut adalah banyaknya perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar. Yang terjadi kemudian mereka terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya. Hal ini memicu peningkatan angka pengangguran. Sebagai gambaran dalam kurun waktu 1997 sampai 1999, terjadi peningkatan angka pengangguran dari 20% dari seluruh angkatan kerja pada tahun 1997 menjadi sebesar 45 % pada tahun 1999 (Hasil SUSENAS, www.bps.go.id, akses 12 Januari 2010). Dengan meningkatnya angka pengangguran berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dengan semakin kecilnya peluang kerja di perusahaan-perusahaan tersebut membuat sektor informal tumbuh subur diantaranya menjadi pedagang kaki lima dengan memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada seperti trotoar, dan beberapa ruang terbuka umum (*public space*). Banyak pedagang kaki lima tersebut memulai berdagang dengan modal uang pesangon dari PHK mereka.

Pertumbuhan sektor informal seperti pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para pedagang kaki lima cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan tata ruang kota. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Seperti peribahasa “ *ada gula ada semut* “ maka pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian suatu kota menjadi ruang yang menarik bagi pedagang kaki lima untuk menawarkan barang dan jasa meskipun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai "Katup Penyelamat" dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, karena kemampuan dari sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan nasional maupun daerah atau kota.

Demikian halnya dengan Kabupaten Tegal yang memiliki pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh terjadinya migrasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1
Laju pertumbuhan penduduk Kab. Tegal
Tahun 2003 – 2008

	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Penduduk	1.423.346	.449.682	1.468.500	.476.799	1.482.551	1.508.213
Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)	1,72	1,85	1,30	0,57	0,39	dalam proses
a. Angka Kematian Bayi (%/th)	-	159	120	76	156	87
b. Angka Kematian Ibu (%/th)	32	34	32	30	31	21
c. Tingkat Migrasi (jiwa)		7.901	6.022	2.489	2.070	6.928

Sumber : SIPD Kab. Tegal 2008

Tingkat migrasi yang cukup tinggi tersebut terutama disebabkan oleh adanya harapan memperoleh pekerjaan di sektor formal. Tetapi dalam kenyataannya, sektor formal atau industri kurang memberi kesempatan kerja bagi pendatang tersebut sehingga mereka yang belum atau tidak mendapat kesempatan di sektor formal, menciptakan lapangan di sektor informal dengan modal dan kemampuan yang mereka miliki.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal juga mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Berdasar data ketenagakerjaan dari Dinsosnakertrans Kab. Tegal, angka pengangguran di Kabupaten Tegal tercatat dalam tabel berikut :

Tabel : I.2
Data ketenagakerjaan Kab. Tegal 2003-2008

Ketenagakerjaan	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
a. Penduduk 15 th keatas	829.793	915.197	949.355	939.952	928.788	938.536
b. Setengah penganggur (kesempatan kerja)	463.267	560.553	616.608	678.269	720.424	972.572
c. Penganggur Terbuka	129.351	156.515	172.166	189.383	209.807	283.239

sumber : Dinsosnakertrans dalam SIPD Kab. Tegal 2008.

Keberadaan PKL merupakan suatu realita saat ini, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya geliat perekonomian di suatu kota/daerah. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Tidak dapat dipungkiri bila saat ini banyak kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Penurunan kualitas itu antara lain dari tidak ditata dan kurang terawatnya pedestrian atau

ruang pejalan kaki, perubahan fungsi taman hijau, atau telah menjadi tempat mangkal para PKL yang mengganggu kenyamanan warga kota lain untuk menikmatinya. Kehadiran kegiatan PKL selalu melanggar aturan atau norma baku, menyebabkan kemacetan, pencemaran, sampah, memampetkan riol, mengganggu kesehatan dan sanitasi, kebersihan lingkungan serta ketertiban.

Problematika PKL ini akan terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah dari waktu ke waktu sehingga dalam satu bulan saja media massa tidak bisa bersih dari isu PKL. Persoalan PKL merupakan persoalan yang saling terkait dengan persoalan sosial lainnya. Penanganan PKL yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah bisa memunculkan persoalan baru yang jauh lebih rumit. Kericuhan sering terjadi saat penertiban karena adanya warga yang menentang pengusuran. Peristiwa penertiban yang berakhir dengan munculnya perlawanan dan jatuh korban, semakin mengukuhkan bahwa kaum pinggiran merupakan artefak kota yang ada saat ini.

Memang persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota bertanggungjawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya tersebut, Pemerintah lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua, yakni pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota. Maka, konsekuensi dari pilihan tersebut adalah dengan menertibkan dan menata PKL. Karena itu, kebijakan yang tidak populer dan kontroversial ini menjadi kebijakan yang kontra produktif dan cenderung sepihak.

Kegiatan sektor informal sejak awal tidak mendapatkan perhatian, sehingga perkembangan kegiatan tersebut sering tidak dimasukkan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Begitu pula jika ditinjau dari dimensi perencanaan tata ruang.

Kawasan di kota – kota kecil di Kabupaten/Kota saat ini telah tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun non fisik serta cenderung menimbulkan permasalahan lingkungan, tata ruang dan sosial sebagaimana kota-kota besar. Permasalahan yang timbul biasanya seperti berikut ini (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2002:64) :

a. Kumuh (*Slummy*)

Kawasan yang dipenuhi pedagang kaki lima biasanya menjadi kumuh dan tidak tertata, air bersih, sampah, drainase menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Jika musim kemarau debu beterbangan , dan apabila musim hujan tiba, banjir dan genangan air terjadi dimana-mana.

Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus dan serangga yang membawa kuman penyakit. Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak ditempat sampah, dan dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare karena mudah hinggap di makanan atau peralatan makan. Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptospirosis, salmonellosis, pes dan lain-lain (Soemirat, 2009:156). Sedangkan serangga dapat membawa berbagai bakteri yang

menyebabkan penyakit disentri dan diare. Nyamuk akan berkembang biak di air yang tidak bergerak di sekitar sampah yang tercecer dan dapat menyebabkan malaria bahkan demam berdarah. Kondisi semacam ini juga terjadi di kawasan Banjaran Kabupaten Tegal seperti terlihat dalam gambar berikut :



Gambar 1.1:
Salah satu sudut di kawasan Banjaran,
kumuh dan tidak tertata



Gambar 1.2 :
Sampah yang dibuang sembarangan
di sekitar lokasi PKL di kawasan Banjaran

b. Kemacetan Lalu Lintas

Selain disebabkan oleh pedagang kaki lima, kemacetan disebabkan oleh perilaku pengemudi angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan, terutama di depan pasar-pasar. Kemacetan yang terjadi mengakibatkan pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor yang berdampak pada lingkungan yaitu menurunnya kualitas udara ambient di suatu wilayah. Semakin banyak kendaraan bermotor yang melintas (apalagi jika terjadi kemacetan lalu lintas) akan semakin banyak menghasilkan emisi gas buang dan memberikan kontribusi cukup besar bagi penurunan kualitas lingkungan udara di lokasi tersebut.

c. Trotoar Berubah Fungsi

Trotoar yang pada awalnya sebagai lalu lintas pejalan kaki untuk menikmati suasana kota berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima, yang memperburuk wajah kota.



Gambar 1.3 :

Trotoar yang berubah fungsi menjadi lapak PKL
di salah satu sudut kawasan Banjaran

Permasalahan diatas muncul secara perlahan-lahan dan terakumulasi menjadi besar. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa berbuat banyak, meskipun terjadi

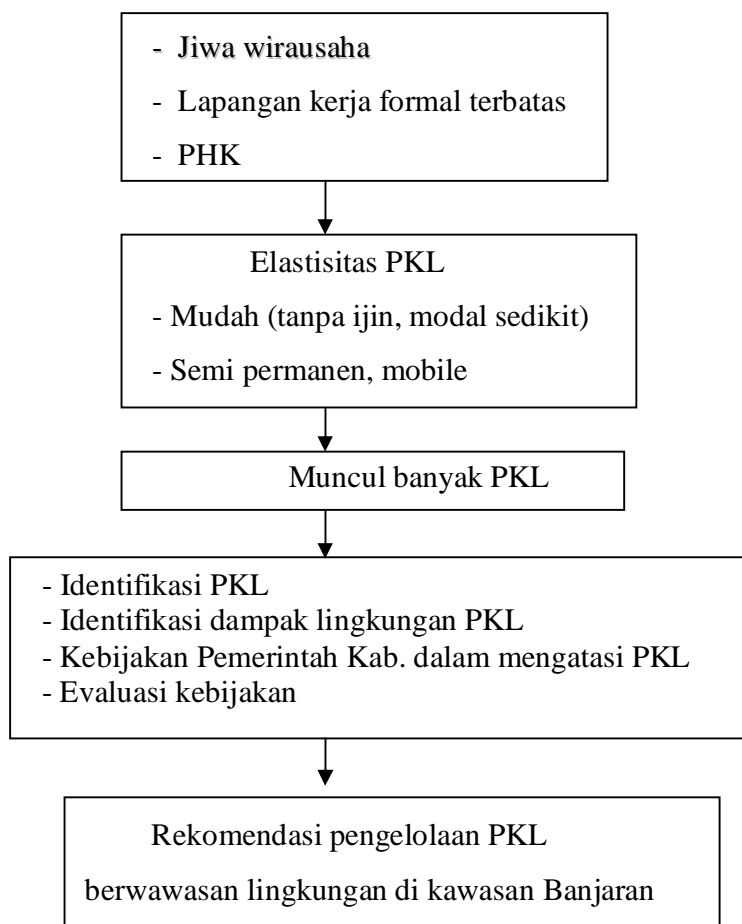
pelanggaran Peraturan Daerah. Era Otonomi Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *Stakeholder Kota* dalam perencanaan dan pembangunan ternyata belum menunjukkan hasilnya. Permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan jaringan utilitas terhadap kegiatan pedagang sektor informal, seperti tempat pembuangan sampah. Dengan tidak adanya tempat pembuangan sampah yang representatif membuat para pedagang cenderung membuang sampah di sembarang tempat bahkan juga pada saluran-saluran drainase (riol) yang terdapat di sekitar lokasi para pedagang kaki lima tersebut. Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air yang akhirnya membuat air terkurung dan tidak bergerak, menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau riol dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dari riol akan masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran dan bibit penyakit masuk

Dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan sektor informal yang tepat akan menyerap banyak tenaga kerja, disamping dapat menurunkan kualitas lingkungan di suatu wilayah, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan pedagang kaki lima dan memberikan mereka fasilitas yang memadai. Dengan demikian diharapkan pengembangan sektor informal ini akan menjadi salah satu pengaman bagi golongan masyarakat marginal untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan tidak merugikan lingkungan.

Di dalam menyusun perencanaan kota pada umumnya di Indonesia seringkali hanya melihat pada kegiatan – kegiatan formal saja. Pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun rencana tata lahan, bangunan dan lingkungan hanya untuk kegiatan formal, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri dan

sebagainya. Sedangkan sektor informal seperti kegiatan pedagang kaki lima dan industri rumah tangga sering terlupakan.

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4 :

Kerangka Pikir Penelitian

1.2. Perumusan Masalah

Sempitnya lapangan pekerjaan formal dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tegal khususnya di kawasan-kawasan sekitar pusat perdagangan. Maraknya pertumbuhan pedagang kaki lima tersebut ternyata menimbulkan permasalahan – permasalahan baru seperti kemacetan lalu lintas, sampah dan permasalahan lainnya. Dalam sebuah media (Radar Tegal, 19 Maret 2009) pernah memuat tentang Kemacetan di Jalur Tegal - Purwokerto, di depan Pasar Banjaran yang diakibatkan oleh aktivitas sekitar 200 pedagang kaki lima, yang menempati trotoar dan bahu jalan dan angkutan kota dan Bus Tegal - Purwokerto yang menaikkan dan menurunkan penumpang di depan Pasar Banjaran.

Di kabupaten Tegal terutama di kawasan Banjaran dan sekitarnya, pertumbuhan dan keberadaan pedagang kaki lima menjadi permasalahan serius karena dianggap menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan seperti terjadinya kesemrawutan, sampah, dan polusi. Bentuk fisik mereka yang biasanya berupa kios-kios kecil yang dibentuk seadanya, bahkan terkadang hanya dengan alas plastik atau karung untuk menggelar barang dagangannya sering dianggap merusak wajah fisik suatu lingkungan yang sudah dibangun dengan rapi. Rencana pembangunan lingkungan yang sudah tertata dan terpadu dapat saja menjadi tidak berhasil dalam implementasinya karena keberadaan dan pertumbuhan pedagang kaki lima tersebut.

Dengan melihat aktivitas pedagang kaki lima yang terjadi di Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Slawi, pedagang kaki lima di Kabupaten Tegal mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Berdasarkan sarana fisik yang digunakan : Selalu mendekati ruang publik di sekitar pasar, baik itu trotoar dan bahu jalan.
2. Bentuk Sarana Usaha : Menggunakan dasaran atau gelaran sebagai tempat berdagang.
3. Tidak mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Daerah
4. Berdasarkan jenis barang dan jasa yang ditawarkan : Kebutuhan primer seperti pakaian, makanan (umumnya jajanan, sayuran) dan kebutuhan sekunder.
5. Kurang memperhatikan kebersihan

Keberadaan PKL di Kabupaten Tegal mengganggu kepentingan umum, kelancaran arus lalu lintas dan rusaknya/terganggunya tatanan lingkungan kota dan seringkali terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Sebagian besar mereka menempati tempat yang strategis dan memperoleh pembeli, padahal di tempat tersebut tidak boleh ada kegiatan usaha; misalnya di trotoar, bahu jalan-jalan protokol dan jalur-jalur hijau sehingga kondisi ini mengganggu ketertiban lingkungan.

Kekeliruan dalam perencanaan pengembangan ruang kota yang sering terjadi adalah tidak adanya upaya untuk menyediakan ruang terpadu yang tepat dan memadai bagi pertumbuhan pedagang kaki lima. Para perencana seringkali hanya memfokuskan pada penyediaan ruang-ruang untuk kegiatan dan fungsi formal saja. Ketersediaan ruang bagi kegiatan dan fungsi informal sering terabaikan.

Untuk itu dibutuhkan sebuah rencana yang komprehensif yang dapat menjadi pedoman dalam menata dan mengatur keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Rencana

penataan dimaksud harus dapat mengakomodir keinginan para pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dalam arah yang benar dan baik sehingga akan terjadi keterpaduan dan memiliki sinergi positif dengan sektor pembangunan yang lain dalam upaya mendukung upaya pembangunan dan pengembangan kabupaten Tegal.

Dari uraian tersebut di atas dan dengan maksud untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Tegal atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan masalah pedagang kaki lima maka peneliti tertarik untuk mengkaji dampak keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana dampak kegiatan pedagang kaki lima di kawasan Banjaran terhadap lingkungan?
- b. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjaran dan sekitarnya?
- c. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun perencanaan lingkungan yang lebih baik dalam rangka penataan kawasan Banjaran dan sekitarnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dampak kegiatan pedagang kaki lima di kawasan Banjaran dan sekitarnya terhadap lingkungan.
- b. Untuk mengevaluasi kebijakan – kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjaran dan sekitarnya
- c. Memberikan alternatif solusi / usulan pengelolaan lingkungan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, masyarakat dan ilmu :

- a. Bagi pemerintah daerah : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan dan penataan pedagang kaki lima di kawasan Banjaran.
- b. Bagi masyarakat : penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang pengelolaan dan penataan lingkungan, juga sebagai informasi bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas PKL terhadap lingkungan jika tidak dilakukan upaya pengelolaan lingkungan yang baik.
- c. Bagi ilmu pengetahuan : studi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendekatan terhadap masalah pedagang kaki lima dan menjadi salah satu masukan sebagai arahan dalam penataan lingkungan kawasan yang bersih, sehat, dan tertib sehingga semua *stakeholder* kota akan merasa nyaman berada di kawasan tersebut.